

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada pokok permasalahan maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Maluku Utara adalah salah satu Provinsi yang di memkarkan diri dari Provinsi Maluku pada tahun 2000, selanjtunya merupakan satu-satunya Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.dan Pulau Halmahera dan sekitarnya, Ibukota Provinsi Maluku Utara yaitu terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan Kota terbesarnya yaitu Ternate yang berfungsi sebagai Ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi.
2. Ke empat Kerajaan yang terdapat di Maluku Utara yang lebih di kenal degan Moluko Kie Raha yaitu Kerajaan Jailolo,Bacan,Tidore dan Ternate merupaka satu rumpun atau satu darah namun hidup dalam permusuhan.
3. Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate merupakan Kerajaan besar yang selalu di warnai dengan konflik karena masing-masing ingin menonjolkan prestasinya dengan jalan melakukan ekspansi wilayah serta mempunyai sifat kepebadian yang berlawanan.

4. Kedatangan bangsa Barat ke Maluku Utara dengan tujuan utamanya adalah monopoli perdagangan dan penyebaran agama Kristen namun ini memberikan nuansa kegembiraan bagi Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena akan mendapat bantuan dalam perluasan wilayah.
5. Semenjak berdirinya kedua kerajaan ini sulit bersatu karena masing-masing ingin mengejar prestise sehingga tidak menghiraukan dampak yang akan terjadi. Perkembangan konflik semakin memuncak ketika masuknya bangsa barat ke daerah Maluku sehingga bertambah rumitlah perselisihan kedua kerajaan tersebut yang pada akhirnya kerajaan Ternate bergabung dengan bangsa Portugis untuk menghancurkan kerajaan Tidore namun kerajaan Tidore pun tidak mau kalah dan bekerjasama dengan bangsa Spanyol sehingga pada akhirnya terjadi peperangan antara kedua kerajaan Ternate dibantu oleh bangsa Portugis dan kerajaan Tidore dibantu oleh bangsa Spanyol.
6. Hal lain yang paling urgen adalah adanya campur tangan pemerintah Portugis dalam hal pengangkatan sultan, sehingga timbulnya konflik bagi sesama kerajaan maupun dalam tubuh kerajaan itu sendiri. Gambaran tersebut di atas sebagaimana terjadi pada kesultanan Tidore pada masa kesultanan Syaifudin, saat itu yang memiliki hak menjadi sultan setelah wafatnya Sultan Saidi adalah Kaicil Goranya, namun dengan adanya campur tangan kompeni Belanda dengan menggunakan politik uang melalui para bobato, mulai dari Jogugu sampai para hukum soasio sehingga berhasil menubatkan adiknya Goranya yaitu Kaicil Galafino (sultan Syaifuddin) menjadi sultan Tidore.

7. Politik campur tangan ini juga terjadi ketika wafatnya Sultan Jamaluddin, seharusnya yang menggantikan adalah putra mahkota akan tetapi bangsa Portugis berupaya mengangkat pamannya yaitu Kaicil Gaijira yang ternyata sudah lanjut usia dan nyaris terjadi bentrokan senjata karena ditantang oleh sejumlah pangeran dan bobato.
8. Tidak sampai disitu saja saat Kaicil Gaijira Wafat kedudukan yang sebenarnya harus kembali ke putra sulung Sultan Jamaluddin sebagai pewaris kerajaan yang sah, namun Belanda berupaya mengangkat Patra Alam, sehingga menimbulkan reaksi keras dari Nuku dan adiknya Kamaluddin, kemudian Patra Alam dicopot dari jabatannya dengan alasan bahwa telah melakukan persekongkolan dengan pihak Nuku, setelah itu upaya kolonial Belanda menjalankan politiknya kembali dengan mengangkat Kamaluddin sebagai Sultan Tidore bukan Nuku sebagai pewaris yang layak karena lebih tua dari Jamaluddin dan sesuai dengan hukum kerajaan yang telah diatur.
9. Pengangkatan Kamaludin selaku putra Jamaludin mempunyai pengaruh pada kepala-kepala rakyat dan raja-raja di kesultanan Tidore, tetapi Nuku menggugat pengangkatan tersebut, karena Nuku lebih berhak terlebih dahulu selaku pangeran yang lebih tua, namun jika Kamaludin menghendaki diakui sebagai sultan maka harus berlepas diri dari Kompeni Belanda, setidaknya mengubah atau membatalkan kontrak dengan Kompeni Belanda, yang mengikat sepihak dan menjadikan sultan Tidore sebagai boneka.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- a. Untuk masyarakat Kerajaan Ternate dan Tidore, agar merevitalisasi nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian yang ada di pihak kedua Kerajaan, dan nilai-nilai budaya serta Tradisi yang dibangun sejak Dahulu hingga sekarang kemudian dikemas sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
- b. Untuk kepentingan pembangunan khususnya pengembangan kebudayaan dan pencatatan sejarah daerah Ternate dan Tidore, maka perlu dibentuk suatu tim peneliti yang akan menangani masalah sejarah dan pariwisata daerah Kerajaan Ternate dan Tidore.
- c. Rekan jurusan Sejarah, diharapkan untuk lebih giat melakukan penelitian-penelitian tentang peranan Kerajaan di Nusantara khususnya Kerajaan Ternate dan Tidore sebagai kelanjutan dari Kerajaan yang ada di Nusantara ini dalam kegiatan kesejarahan, Tujuan melakukan penelitian-penelitian di Kesultanan Ternate sebagai objek Sejarah akan menambah pengetahuan dan wawasan kesejarahan. Kita tahu bahwa untuk mengkaji Sejarah tidak hanya cukup di lingkungan formal saja, melainkan juga dengan praktek atau terjun langsung ke lapangan sehingga wawasan kesejarahan semakin lengkap dan berbobot nilainya.

